

Analisis Efisiensi Strategi Optimalisasi Kemitraan Operasional bagi Perusahaan Kurir

Abdul Jamil¹

¹Magister Manajemen, Pasca Sarjana, Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received December 17, 2024

Revised December 19, 2024

Accepted December 29, 2024

Available online 25 January, 2025

Kata Kunci:

Kemitraan Operasional, Perusahaan Kurir

Keywords:

Operational Partnership, Courier Company



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Strategi kemitraan operasional dalam industri kurir memberikan keuntungan bagi perusahaan melalui efisiensi biaya dan fleksibilitas bisnis. Namun, dari perspektif mitra, terdapat tantangan seperti ketidakstabilan penghasilan serta minimnya jaminan sosial. Peran pemerintah menjadi krusial dalam mengatur skema ini agar menciptakan keseimbangan kepentingan. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh perusahaan dari pola kemitraan operasional dalam industri kurir sangatlah signifikan, terutama dalam hal efisiensi biaya, fleksibilitas operasional, dan kemampuan untuk memperluas jangkauan pasar tanpa harus melakukan investasi besar. Salah satu keuntungan utama yang dihadapi perusahaan adalah efisiensi biaya yang dapat dicapai melalui penggunaan mitra. Dalam pola kemitraan ini, perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya tetap yang besar, seperti gaji bulanan dan tunjangan yang biasanya diberikan kepada karyawan tetap. Sebaliknya, mitra yang berstatus sebagai pekerja lepas atau independen hanya dibayar berdasarkan jumlah pengiriman yang mereka lakukan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pengeluaran tetap, serta menyesuaikan jumlah mitra dengan kebutuhan bisnis yang fluktuatif.

ABSTRACT

Operational partnership strategies in the courier industry provide benefits to companies through cost efficiency and business flexibility. However, from the partner's perspective, there are challenges such as income instability and minimal social security. The role of the government is crucial in regulating this scheme to create a balance of interests. The results of this study indicate that the benefits obtained by companies from operational partnership patterns in the courier industry are very significant, especially in terms of cost efficiency, operational flexibility, and the ability to expand market reach without having to make large investments. One of the main advantages faced by companies is the cost efficiency that can be achieved through the use of partners. In this partnership pattern, companies do not need to spend large fixed costs, such as monthly salaries and benefits that are usually given to permanent employees. On the other hand, partners who have freelance or independent status are only paid based on the number of deliveries they make. This allows companies to reduce fixed expenses, as well as adjust the number of partners to fluctuating business needs.

PENDAHULUAN

Industri kurir telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu faktor utama yang mendorong perkembangan ini adalah pesatnya pertumbuhan sektor e-commerce di seluruh dunia. Pertumbuhan ini didorong oleh semakin meningkatnya preferensi konsumen untuk berbelanja secara online, yang membutuhkan layanan pengiriman barang yang cepat dan efisien. Selain itu, tren ini juga menciptakan tantangan bagi perusahaan kurir untuk dapat memenuhi permintaan pengiriman barang yang semakin tinggi dan membutuhkan waktu yang lebih singkat. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan kurir harus mengadopsi berbagai strategi untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi operasional mereka, salah satunya dengan mengadopsi strategi kemitraan operasional (Wirabuana & Prasetya, 2024). Strategi kemitraan operasional menjadi solusi yang banyak dipilih oleh perusahaan kurir dalam menghadapi tantangan ini. Kemitraan operasional adalah bentuk kolaborasi antara perusahaan kurir dengan pihak eksternal, seperti penyedia layanan logistik lainnya atau mitra bisnis lain yang memiliki sumber daya yang dibutuhkan. Skema ini memungkinkan perusahaan kurir

*Corresponding author

Email: jamil81kutau@gmail.com

untuk memanfaatkan sumber daya eksternal, tanpa harus mengeluarkan investasi besar untuk membeli aset fisik atau merekrut tenaga kerja tetap. Dengan demikian, perusahaan kurir bisa lebih fleksibel dalam mengelola operasional mereka, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi dalam menghadapi lonjakan volume pengiriman (Wijonarko, 2023).

Namun, meskipun strategi kemitraan operasional menawarkan berbagai keuntungan, penerapannya tidaklah tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah koordinasi antara perusahaan kurir dan mitra. Dalam banyak kasus, meskipun kedua pihak berusaha untuk saling mendukung, perbedaan dalam sistem operasional, budaya organisasi, serta cara berkomunikasi dapat menjadi kendala yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya yang maksimal untuk menyelaraskan proses dan tujuan operasional di antara para mitra agar dapat mencapai kesuksesan bersama (Syahadat, 2019). Selain tantangan internal, perusahaan kurir juga harus memperhatikan kebijakan pemerintah yang mengatur kemitraan operasional ini. Kebijakan pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perusahaan kurir dan mitra mereka untuk berkembang. Kebijakan yang tidak mendukung atau bahkan menghambat kemitraan operasional dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam pasar, mengurangi keuntungan bagi pihak-pihak terkait, dan mempersulit implementasi strategi kemitraan. Sebagai contoh, pemerintah dapat mengatur aspek seperti regulasi terkait tarif pengiriman, pajak, serta persyaratan untuk penyedia layanan logistik eksternal yang ingin bekerja sama dengan perusahaan kurir. Oleh karena itu, kebijakan yang adil dan mendukung perlu diterapkan agar sektor ini dapat berkembang dengan lebih optimal. Selain itu, penerapan strategi kemitraan operasional juga dihadapkan pada berbagai tantangan teknis dan operasional (Simbolon, 2022).

Salah satu tantangan teknis yang sering muncul adalah integrasi sistem antara perusahaan kurir dan mitra. Sistem manajemen logistik yang digunakan oleh kedua pihak harus dapat terhubung dan saling mendukung agar pengiriman barang dapat dilakukan secara efisien. Integrasi teknologi yang kompleks ini sering kali membutuhkan investasi waktu dan sumber daya yang tidak sedikit, yang bisa menjadi kendala bagi perusahaan kurir dengan skala yang lebih kecil. Selain itu, tantangan lain yang dapat muncul adalah pengelolaan kualitas layanan. Meskipun perusahaan kurir sudah bekerja sama dengan mitra yang memiliki reputasi baik, kualitas layanan yang diberikan tetap bisa bervariasi. Oleh karena itu, perusahaan kurir perlu memiliki sistem pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa pengiriman tetap dilakukan dengan standar kualitas yang tinggi (Kahfi & Wahjuningati, 2022). Di sisi lain, kemitraan operasional juga membawa dampak positif bagi perusahaan kurir dan mitra mereka. Bagi perusahaan kurir, strategi ini memberikan akses ke sumber daya yang lebih besar tanpa perlu melakukan investasi besar dalam infrastruktur fisik maupun tenaga kerja tetap. Hal ini sangat menguntungkan dalam situasi di mana permintaan pengiriman barang sangat fluktuatif, sehingga perusahaan kurir tidak perlu menanggung beban biaya tetap yang tinggi saat volume pengiriman rendah. Selain itu, kemitraan operasional juga memberikan perusahaan kurir kesempatan untuk memperluas jangkauan layanan mereka tanpa harus membuka cabang baru. Dengan bekerja sama dengan mitra yang memiliki jaringan pengiriman yang luas, perusahaan kurir dapat menjangkau lebih banyak pelanggan di lokasi yang sebelumnya sulit dijangkau (Nariendra dkk., 2021).

Bagi mitra yang terlibat, kemitraan operasional juga memberikan keuntungan, terutama dalam hal memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan. Mitra yang memiliki sumber daya logistik seperti armada kendaraan atau fasilitas penyimpanan barang dapat mengoptimalkan penggunaan aset mereka dengan menjalin kerja sama dengan perusahaan kurir. Dengan demikian, mereka dapat memperoleh pendapatan tambahan tanpa harus memikul risiko penuh yang biasanya dihadapi dalam menjalankan usaha secara mandiri. Namun, meskipun kemitraan operasional dapat memberikan keuntungan yang signifikan, tidak semua pihak dapat memperoleh manfaat yang sama besar. Terkadang, mitra yang lebih kecil atau memiliki sumber daya terbatas mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi standar operasional yang ditetapkan oleh perusahaan kurir yang lebih besar. Dalam hal ini, diperlukan adanya kesepakatan yang jelas mengenai pembagian tanggung jawab dan hak antara kedua belah pihak, serta penyusunan kontrak yang adil dan transparan agar tidak terjadi ketimpangan yang merugikan salah satu pihak. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini adalah pengaruh kebijakan pemerintah terhadap penerapan strategi kemitraan operasional dalam industri kurir (Izzati, 2022). Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan regulasi yang mendukung kemitraan ini. Kebijakan yang baik dapat memperlancar proses kerja sama antara perusahaan kurir dan mitra mereka. Sebaliknya, kebijakan yang tidak tepat atau membatasi ruang gerak perusahaan kurir dan mitra dalam menjalankan operasional mereka dapat menghambat pengembangan industri kurir secara keseluruhan. Misalnya, kebijakan yang berkaitan dengan pajak dan tarif pengiriman dapat mempengaruhi daya saing perusahaan kurir. Jika tarif pengiriman yang dikenakan terlalu tinggi atau sistem perpajakan

yang rumit, hal ini dapat meningkatkan biaya operasional dan membuat perusahaan kurir kesulitan dalam bersaing di pasar.

Di sisi lain, regulasi yang mendukung implementasi kemitraan operasional juga harus mencakup perlindungan bagi mitra, terutama dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban mereka. Dengan adanya peraturan yang jelas mengenai tanggung jawab masing-masing pihak dalam suatu kemitraan, maka hubungan antara perusahaan kurir dan mitra akan lebih stabil dan terhindar dari potensi konflik. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan insentif atau dukungan lain bagi perusahaan kurir dan mitra untuk mengembangkan infrastruktur teknologi yang lebih baik. Hal ini akan meningkatkan efisiensi operasional dan meminimalkan potensi kesalahan yang bisa terjadi dalam proses pengiriman barang. Secara keseluruhan, strategi kemitraan operasional dalam industri kurir memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas operasional. Namun, agar strategi ini dapat diterapkan dengan efektif, perusahaan kurir dan mitra mereka harus mampu mengatasi tantangan dalam koordinasi, kebijakan pemerintah, serta pengelolaan kualitas layanan. Diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk menyelaraskan tujuan dan sistem operasional antara kedua pihak agar kemitraan ini dapat memberikan manfaat yang maksimal. Dengan adanya regulasi yang mendukung dan kerja sama yang solid, industri kurir dapat berkembang lebih pesat, dan sektor e-commerce yang semakin berkembang juga dapat lebih cepat memenuhi kebutuhan pengiriman barang yang semakin kompleks.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Pola Kemitraan Operasional

Pola kemitraan operasional dalam konteks bisnis merujuk pada suatu model di mana sebuah perusahaan menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk menjalankan kegiatan operasional yang mendukung kegiatan utama perusahaan tersebut. Model ini memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada tanpa harus melakukan investasi besar dalam aset tetap atau merekrut tenaga kerja tetap. Dalam konteks industri kurir, pola kemitraan operasional ini semakin populer karena perkembangan pesat e-commerce yang menuntut layanan pengiriman yang cepat, efisien, dan dapat diandalkan. Di industri ini, pola kemitraan operasional terutama melibatkan penggunaan mitra pengemudi yang berstatus non-karyawan serta kerja sama dengan agen distribusi independen, yang masing-masing memainkan peran penting dalam meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi operasional. Sebagai gambaran umum, pola kemitraan operasional memungkinkan perusahaan kurir untuk memperluas kapasitasnya tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk membeli armada kendaraan atau merekrut pengemudi tetap (Isnardono & Nicholas, 2024). Dalam hal ini, perusahaan kurir tidak perlu bertanggung jawab atas pengelolaan pengemudi sebagai karyawan tetap, melainkan dapat menggandeng individu atau pihak ketiga untuk menyediakan layanan pengiriman. Mitra pengemudi ini biasanya bekerja dengan status sebagai pekerja lepas atau kontraktor independen, yang bertanggung jawab atas kendaraan dan peralatan yang mereka gunakan untuk mengantarkan barang.

Hal ini memungkinkan perusahaan kurir untuk mengurangi beban biaya tetap yang terkait dengan pengelolaan karyawan tetap dan aset fisik. Dalam praktiknya, kemitraan ini sering kali melibatkan pengaturan kontrak yang jelas antara perusahaan kurir dan mitra pengemudi. Perusahaan kurir biasanya menyediakan platform atau aplikasi untuk memfasilitasi proses pemesanan dan pelacakan pengiriman, sementara mitra pengemudi bertugas untuk mengantarkan barang kepada pelanggan. Pendekatan ini menawarkan fleksibilitas yang besar bagi kedua belah pihak, di mana perusahaan kurir dapat memperbesar atau memperkecil kapasitas operasional sesuai dengan kebutuhan pasar, tanpa terikat oleh komitmen terhadap jumlah karyawan tetap. Di sisi lain, mitra pengemudi juga dapat memilih waktu kerja mereka sendiri dan memanfaatkan kendaraan pribadi mereka untuk kegiatan pengiriman, yang memberi mereka kebebasan dalam mengelola waktu dan pendapatan mereka. Selain mitra pengemudi, perusahaan kurir juga dapat bekerja sama dengan agen distribusi independen sebagai bagian dari pola kemitraan operasional. Agen distribusi independen ini berfungsi sebagai pihak ketiga yang menangani sebagian dari aktivitas distribusi, seperti pengelolaan gudang, pengemasan, dan pengaturan pengiriman barang ke pelanggan akhir. Dalam banyak kasus, agen distribusi independen ini memiliki infrastruktur dan jaringan mereka sendiri, yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan kurir untuk memperluas jangkauan layanan mereka. Kemitraan ini memungkinkan perusahaan kurir untuk menghemat biaya investasi yang diperlukan untuk membangun infrastruktur distribusi mereka sendiri, serta mengakses kapasitas distribusi yang lebih besar dan lebih terdiversifikasi. Model kemitraan operasional ini memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan kurir. Salah satu keuntungan utamanya adalah fleksibilitas dalam mengelola sumber daya operasional. Dengan menggandeng pihak ketiga, perusahaan kurir tidak perlu terikat pada biaya tetap yang terkait dengan pengadaan kendaraan, fasilitas gudang, atau pengelolaan tenaga kerja tetap. Sebaliknya, perusahaan dapat menyesuaikan kapasitas operasional mereka dengan permintaan pasar yang fluktuatif, yang sangat penting dalam industri kurir yang dipengaruhi oleh faktor

musiman dan lonjakan pengiriman, terutama pada saat-saat puncak seperti festival belanja online atau hari raya. Fleksibilitas ini juga memberikan keuntungan bagi mitra pengemudi dan agen distribusi independen. Mitra pengemudi dapat bekerja sesuai dengan jadwal mereka, yang memberi mereka kebebasan dalam menentukan berapa banyak pengiriman yang ingin mereka lakukan. Selain itu, mereka dapat memanfaatkan kendaraan pribadi mereka, yang mengurangi kebutuhan akan modal awal untuk membeli kendaraan. Demikian pula, agen distribusi independen dapat mengatur operasional mereka sendiri, menggunakan infrastruktur yang sudah ada untuk bekerja sama dengan perusahaan kurir, sehingga mengurangi biaya operasional mereka sendiri (Fauzi, 2024).

Dengan demikian, model kemitraan ini menciptakan simbiosis antara perusahaan kurir dan mitra mereka, yang menguntungkan kedua belah pihak. Namun, meskipun pola kemitraan operasional menawarkan banyak keuntungan, model ini juga memiliki tantangan yang perlu dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah pengelolaan hubungan antara perusahaan kurir dan mitra pengemudi atau agen distribusi independen. Meskipun kedua belah pihak bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, perbedaan dalam tujuan bisnis dan ekspektasi dapat menyebabkan ketegangan. Misalnya, perusahaan kurir mungkin menginginkan pengemudi untuk menyelesaikan pengiriman dalam waktu yang sangat ketat, sementara pengemudi yang bekerja secara independen mungkin memiliki prioritas yang berbeda terkait dengan fleksibilitas kerja atau pendapatan yang diinginkan. Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi perusahaan kurir untuk memiliki sistem komunikasi yang jelas dan efektif dengan mitra mereka. Perusahaan perlu memastikan bahwa pengemudi dan agen distribusi independen memahami harapan dan standar yang diinginkan, serta mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan menyediakan pelatihan atau pengarahan mengenai prosedur operasional yang tepat, serta memastikan bahwa mitra memiliki akses ke teknologi yang memadai, seperti aplikasi pengiriman yang mudah digunakan dan alat pelacakan pengiriman yang akurat. Selain itu, perusahaan kurir juga harus menjaga kualitas layanan yang konsisten meskipun bekerja dengan mitra yang tidak terikat langsung sebagai karyawan.

Pengawasan terhadap kualitas layanan menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa pelanggan tetap menerima pengalaman pengiriman yang memuaskan. Oleh karena itu, perusahaan kurir perlu memiliki sistem pemantauan dan evaluasi yang baik untuk menilai kinerja mitra mereka. Ini bisa mencakup penilaian berdasarkan waktu pengiriman, kondisi barang yang diterima, serta umpan balik dari pelanggan. Dengan adanya pengawasan yang ketat, perusahaan kurir dapat memastikan bahwa mitra mereka memenuhi standar yang diinginkan dan bahwa kemitraan ini tetap saling menguntungkan. Pola kemitraan operasional ini juga mengharuskan adanya penyusunan perjanjian atau kontrak yang jelas dan terperinci antara perusahaan kurir dan mitra pengemudi atau agen distribusi independen. Dalam kontrak ini, akan dijelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk pembagian pendapatan, tanggung jawab atas kerusakan barang, serta aturan mengenai ketepatan waktu pengiriman. Dengan adanya kontrak yang jelas, kedua belah pihak dapat menghindari potensi sengketa atau kesalahpahaman yang mungkin timbul selama pelaksanaan kemitraan. Di samping itu, penting juga bagi perusahaan kurir untuk memperhatikan faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi keberhasilan pola kemitraan operasional ini. Salah satunya adalah regulasi pemerintah yang mengatur industri pengiriman barang dan ketenagakerjaan. Di beberapa negara, ada undang-undang yang mengatur status pengemudi dan pekerja lepas lainnya, yang dapat mempengaruhi cara perusahaan kurir menjalankan kemitraan operasional mereka. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa mereka mematuhi semua regulasi yang berlaku dan bahwa mitra mereka juga mengikuti aturan yang sama.

b. Regulasi Pemerintah

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mengatur hubungan kerja dalam sektor jasa pengiriman. Kebijakan ini dirancang untuk menyeimbangkan antara perlindungan hak tenaga kerja dan kemajuan sektor bisnis, terutama dalam era *gig economy* yang terus berkembang (Fadillah, 2024). Salah satu aspek penting yang mengatur hubungan kerja dalam sektor pengiriman adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang berfungsi sebagai dasar hukum untuk melindungi hak-hak pekerja. Di samping itu, peraturan terkait *gig economy* juga mulai diterapkan untuk mengatur hubungan kerja antara perusahaan dan mitra yang tidak terikat kontrak kerja tetap. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara fleksibilitas operasional yang dibutuhkan perusahaan dalam menjalankan bisnis dan perlindungan hak-hak pekerja agar mereka tetap mendapatkan manfaat dan kesejahteraan yang layak. Sektor jasa pengiriman di Indonesia, khususnya yang melibatkan model kemitraan operasional dengan pengemudi dan agen distribusi independen, mengalami transformasi signifikan akibat perkembangan teknologi dan permintaan yang tinggi dari sektor *e-commerce*. Dalam menjalankan bisnis pengiriman, perusahaan kurir seringkali memilih untuk menggandeng mitra yang

berstatus sebagai pekerja lepas, bukan karyawan tetap. Mitra ini, seperti pengemudi ojek online dan agen distribusi, bekerja secara fleksibel berdasarkan kontrak yang lebih longgar dan tanpa komitmen jangka panjang. Pola kemitraan ini memungkinkan perusahaan kurir untuk mengurangi biaya operasional yang terkait dengan karyawan tetap, seperti gaji bulanan, tunjangan, dan fasilitas lainnya. Namun, keberlanjutan model ini sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang dapat menjamin kesejahteraan mitra, sekaligus mempertahankan fleksibilitas yang diperlukan oleh perusahaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia mengatur berbagai aspek hubungan kerja, termasuk hak-hak pekerja, pengupahan, jaminan sosial, dan kondisi kerja. Meskipun undang-undang ini terutama ditujukan untuk melindungi karyawan tetap, terdapat pengaruhnya terhadap pekerja lepas yang terlibat dalam *gig economy*, termasuk mitra pengemudi dalam industri kurir. Salah satu tantangan besar dalam menerapkan undang-undang ini pada sektor *gig economy* adalah status ketenagakerjaan yang tidak jelas antara pekerja lepas dan karyawan tetap.

Mitra pengemudi seringkali tidak memenuhi kriteria sebagai pekerja tetap, sehingga mereka tidak terikat oleh peraturan yang berlaku untuk karyawan penuh waktu (Anugrah dkk., 2022). Namun, pada saat yang sama, mereka juga tidak memiliki perlindungan yang sama seperti yang diberikan kepada karyawan tetap dalam hal upah, tunjangan kesehatan, atau jaminan pensiun. Di sinilah regulasi terkait *gig economy* mulai mengambil peran penting. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan peraturan yang lebih spesifik terkait dengan pekerjaan di *gig economy*, termasuk pengemudi ojek online dan pekerja lepas lainnya. Tujuan dari regulasi ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi pekerja lepas tanpa mengganggu fleksibilitas yang dimiliki oleh perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Pemerintah mengakui bahwa model bisnis yang mengandalkan pekerja lepas, seperti yang terdapat dalam sektor jasa pengiriman, memiliki peran penting dalam perekonomian digital dan ekonomi berbasis platform. Oleh karena itu, regulasi tersebut berupaya menciptakan keseimbangan yang adil antara hak pekerja dan kebutuhan operasional perusahaan. Regulasi *gig economy* ini berfokus pada beberapa aspek, termasuk pengaturan upah yang adil, jaminan sosial, serta hak-hak terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Sebagai contoh, pengemudi yang bekerja untuk perusahaan kurir di Indonesia dapat memperoleh akses ke program jaminan sosial, seperti BPJS Ketenagakerjaan, yang memberikan perlindungan terkait kecelakaan kerja, penyakit, dan pensiun. Selain itu, peraturan tersebut juga mencakup kewajiban perusahaan untuk memberikan pelatihan dan fasilitas yang memadai bagi mitra pengemudi agar mereka dapat bekerja dengan aman dan efisien. Dengan adanya regulasi semacam ini, mitra pengemudi dapat merasakan perlindungan hukum yang setara dengan pekerja lainnya, meskipun status mereka bukan karyawan tetap.

Namun, keberhasilan implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan besar. Salah satunya adalah ketidaksesuaian antara kebutuhan perusahaan untuk mempertahankan fleksibilitas dan tuntutan perlindungan hak-hak pekerja yang lebih kuat. Perusahaan kurir, sebagai contoh, seringkali menginginkan kebebasan untuk menyesuaikan jumlah mitra pengemudi sesuai dengan fluktuasi permintaan pengiriman tanpa terikat oleh kewajiban yang berat seperti yang berlaku untuk karyawan tetap. Oleh karena itu, kebijakan yang diusulkan harus dapat menyeimbangkan antara kedua hal tersebut, dengan tetap memastikan bahwa pekerja lepas mendapatkan hak-hak mereka, seperti upah yang adil dan akses ke jaminan sosial. Selain itu, ada juga tantangan dalam hal implementasi dan pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang ada. Meskipun pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan terkait *gig economy*, pengawasan terhadap implementasinya masih terbatas. Beberapa perusahaan kurir mungkin masih belum sepenuhnya memenuhi kewajiban mereka dalam hal penyediaan perlindungan bagi mitra mereka. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum agar regulasi tersebut dapat diterapkan dengan efektif. Salah satu cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan memperkuat peran lembaga pengawas ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa perusahaan kurir dan platform lainnya mematuhi peraturan yang ada.

Kebijakan pemerintah juga mempengaruhi keberlanjutan pola kemitraan operasional dalam industri kurir, khususnya dalam hal implementasi teknologi. Di era digital saat ini, banyak perusahaan kurir yang mengandalkan platform teknologi untuk menghubungkan mitra pengemudi dengan pelanggan. Teknologi ini memungkinkan pengemudi untuk menerima pesanan secara langsung melalui aplikasi, memantau rute pengiriman secara real-time, serta menerima pembayaran melalui sistem elektronik. Pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi terkait dengan keamanan data pribadi dan transaksi digital juga diterapkan secara ketat untuk melindungi para mitra pengemudi dan pelanggan. Kebijakan ini mencakup perlindungan data pribadi pengemudi dan pelanggan yang dilakukan melalui platform teknologi, sehingga informasi pribadi tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Lebih jauh lagi, kebijakan pemerintah dalam sektor jasa pengiriman juga berdampak pada pengembangan infrastruktur yang mendukung industri ini. Pemerintah diharapkan dapat menyediakan

fasilitas yang memadai untuk mendukung operasional perusahaan kurir, seperti jalan raya yang baik, sistem logistik yang efisien, dan peraturan yang mendukung pengelolaan barang dan pengemudi. Keberadaan infrastruktur yang baik sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan pengiriman barang, yang pada gilirannya akan mendukung keberlanjutan model kemitraan operasional.

c. Efektivitas Strategi Kemitraan Operasional

Efektivitas pola kemitraan dalam industri kurir dapat diukur dari dua perspektif utama, yaitu keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan dan kesejahteraan mitra yang terlibat. Setiap model kemitraan yang diterapkan dalam dunia usaha tentu memiliki dampak yang berbeda-beda, baik bagi pihak perusahaan yang menjalankan operasional maupun bagi mitra yang bekerja di dalamnya. Dalam hal ini, perusahaan dan mitra memiliki tujuan yang berbeda, tetapi keduanya harus saling mendukung untuk mencapai keberlanjutan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, pengukuran efektivitas pola kemitraan harus mempertimbangkan keseimbangan antara pencapaian tujuan perusahaan dan perlindungan bagi kesejahteraan mitra yang bekerja. Dari sudut pandang perusahaan, penerapan pola kemitraan operasional dalam industri kurir memberikan banyak keuntungan, terutama dalam hal pengurangan biaya tetap dan peningkatan daya saing. Dalam industri yang sangat kompetitif, di mana permintaan terhadap layanan pengiriman barang terus meningkat, perusahaan perlu mengoptimalkan biaya operasional mereka. Dengan mengadopsi model kemitraan yang menggandeng mitra pengemudi atau agen distribusi independen, perusahaan dapat mengurangi biaya yang terkait dengan karyawan tetap. Biaya-biaya tersebut meliputi gaji bulanan, tunjangan, fasilitas kesehatan, dan jaminan pensiun yang biasanya diterima oleh karyawan tetap. Dalam model kemitraan, perusahaan hanya perlu membayar mitra berdasarkan kinerja mereka, yang sering kali berbentuk pembayaran per transaksi atau per pengiriman. Selain itu, penggunaan mitra independen memungkinkan perusahaan untuk lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan yang cepat dalam pasar, terutama dalam menghadapi lonjakan permintaan yang tiba-tiba, misalnya pada musim liburan atau saat promosi e-commerce besar.

Perusahaan dapat dengan mudah menambah jumlah mitra untuk menangani lonjakan permintaan tanpa harus merekrut karyawan baru secara permanen. Model kemitraan ini juga memungkinkan perusahaan untuk berfokus pada peningkatan kualitas layanan, inovasi teknologi, dan pengembangan strategi pemasaran, karena mereka tidak perlu mengalokasikan sumber daya besar untuk manajemen sumber daya manusia yang lebih kompleks. Dengan demikian, pola kemitraan operasional ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan daya saing perusahaan, karena mereka dapat menyediakan layanan pengiriman yang cepat dan efisien dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan model bisnis tradisional yang mengandalkan tenaga kerja tetap. Namun, di sisi lain, meskipun perusahaan mendapatkan banyak keuntungan dari penerapan pola kemitraan ini, model ini juga membawa beberapa tantangan, terutama bagi mitra yang terlibat dalam sistem tersebut (Aji dkk., 2021). Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh mitra, baik pengemudi maupun agen distribusi, adalah ketidakpastian pendapatan. Sebagai pekerja lepas, mitra tidak memiliki jaminan pendapatan yang tetap setiap bulannya. Pendapatan mereka sangat bergantung pada jumlah tugas atau pengiriman yang mereka dapatkan dalam periode tertentu. Fluktuasi permintaan yang tajam, misalnya selama musim sepi atau saat terjadi penurunan aktivitas e-commerce, dapat berdampak langsung pada pendapatan mitra. Hal ini menimbulkan ketidakpastian finansial, yang tentunya dapat menjadi beban bagi mitra yang bergantung pada penghasilan dari pekerjaan ini sebagai sumber utama pendapatan mereka. Selain itu, mitra dalam model kemitraan ini sering kali tidak mendapatkan perlindungan sosial yang memadai. Dalam banyak kasus, mitra pengemudi atau agen distribusi tidak memiliki akses kepada berbagai hak yang biasanya diterima oleh pekerja tetap, seperti tunjangan kesehatan, jaminan pensiun, atau asuransi kecelakaan kerja.

Meskipun beberapa perusahaan kurir berusaha memberikan perlindungan sosial melalui program kemitraan tertentu, namun tidak semua mitra mendapatkan manfaat yang sama. Hal ini menimbulkan kerentanan bagi mitra, terutama dalam situasi di mana mereka menghadapi kecelakaan kerja atau masalah kesehatan yang menghambat mereka untuk bekerja. Sebagai pekerja lepas, mitra tidak memiliki hak yang jelas untuk mendapatkan cuti sakit, cuti melahirkan, atau manfaat lainnya yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan tetap. Ini menjadi isu besar, karena banyak mitra yang bekerja dalam kondisi yang tidak sepenuhnya aman dan terlindungi. Ketidakpastian pendapatan dan minimnya perlindungan sosial ini juga berpotensi menurunkan motivasi dan kualitas kerja para mitra. Meskipun fleksibilitas dalam waktu kerja bisa menjadi keuntungan bagi beberapa mitra, namun ketidakpastian tentang berapa banyak pendapatan yang bisa diperoleh dari pekerjaan tersebut dapat membuat mereka merasa tidak stabil. Terlebih lagi, dalam beberapa kasus, beberapa mitra mungkin terpaksa menerima pengiriman atau pekerjaan tambahan yang tidak sesuai dengan kapasitas mereka hanya untuk memenuhi target pendapatan. Kondisi ini dapat menyebabkan stres dan kelelahan, yang

pada gilirannya bisa mempengaruhi kinerja mereka dan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan. Oleh karena itu, kesejahteraan mitra menjadi hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan oleh perusahaan dalam merancang model kemitraan ini.

Bagi perusahaan, meskipun mereka diuntungkan dengan biaya operasional yang lebih rendah, mereka juga perlu memperhatikan dampak jangka panjang dari ketidakpuasan mitra terhadap kualitas layanan mereka. Jika mitra merasa tidak dihargai atau tidak mendapatkan dukungan yang memadai, mereka mungkin akan mencari peluang di tempat lain atau bahkan berhenti bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas layanan, yang pada akhirnya dapat merugikan perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, meskipun perusahaan dapat mengurangi biaya tetap dan meningkatkan daya saing, mereka juga perlu berinvestasi dalam program yang mendukung kesejahteraan mitra, seperti pelatihan, fasilitas kesehatan, dan program insentif yang dapat meningkatkan motivasi dan kinerja mitra. Selain itu, perusahaan juga perlu menjaga keseimbangan antara fleksibilitas operasional dan perlindungan hak-hak mitra. Model kemitraan operasional yang menguntungkan bagi perusahaan tidak boleh mengorbankan hak-hak dasar mitra. Perusahaan dapat mempertimbangkan untuk memberikan perlindungan sosial melalui skema yang lebih inklusif, seperti asuransi kecelakaan kerja, program kesehatan, dan pelatihan yang membantu mitra meningkatkan keterampilan mereka untuk bekerja lebih efisien dan aman. Program-program ini dapat meningkatkan rasa aman dan kenyamanan bagi mitra, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menggali secara mendalam mengenai strategi kemitraan operasional dalam industri kurir, serta dampaknya terhadap perusahaan dan mitra. Pendekatan kualitatif dipilih karena metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti, melalui analisis data yang bersifat deskriptif dan kontekstual. Pendekatan ini tidak hanya terbatas pada pengumpulan data numerik, melainkan lebih mengutamakan pemahaman terhadap pengalaman, pandangan, serta dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan strategi kemitraan operasional di industri kurir. Sebagai bagian dari metodologi, penelitian ini memanfaatkan studi literatur dan analisis kebijakan yang dianggap relevan dengan topik yang sedang dikaji. Studi literatur merupakan salah satu langkah pertama dalam penelitian ini, di mana peneliti mengumpulkan berbagai referensi yang berasal dari sumber-sumber yang kredibel seperti jurnal ilmiah, buku, laporan industri, serta artikel-artikel yang berkaitan dengan kemitraan operasional dalam industri kurir. Literatur yang digunakan tidak hanya terbatas pada studi-studi yang bersifat teori, tetapi juga mencakup praktik-praktik yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan kurir yang sudah sukses atau bahkan mengalami kegagalan dalam menerapkan strategi kemitraan.

Data yang diambil dari jurnal ilmiah memberikan gambaran tentang teori-teori dasar serta temuan-temuan dari penelitian terdahulu yang terkait dengan pola kemitraan dalam berbagai sektor industri, termasuk industri kurir. Laporan industri menjadi sumber yang penting karena memberikan informasi mengenai tren terbaru, perkembangan teknologi, dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan kurir dalam mengelola kemitraan operasional mereka. Sedangkan regulasi pemerintah yang relevan juga dijadikan referensi untuk menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah mengatur hubungan kemitraan dan mengatur aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan hak-hak mitra. Melalui studi literatur ini, peneliti dapat membangun fondasi pengetahuan yang kuat mengenai berbagai konsep dan praktik yang terkait dengan pola kemitraan operasional. Sumber-sumber ini memberikan panduan bagi peneliti untuk membandingkan berbagai perspektif dan teori yang ada, serta melihat bagaimana teori-teori tersebut diterapkan dalam konteks praktis. Selain itu, studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi celah-celah pengetahuan yang mungkin belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini bisa memberikan kontribusi yang lebih baru dan lebih aplikatif. Selain studi literatur, analisis kebijakan juga menjadi bagian penting dari pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis kebijakan dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan pemerintah terkait ketenagakerjaan, *gig economy*, dan regulasi sektor jasa pengiriman mempengaruhi pelaksanaan pola kemitraan operasional dalam industri kurir. Kebijakan pemerintah memegang peranan penting dalam menciptakan iklim yang mendukung atau bahkan membatasi keberlanjutan strategi kemitraan operasional.

Sebagai contoh, undang-undang ketenagakerjaan yang mengatur hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja, serta regulasi yang terkait dengan perlindungan sosial dan hak-hak pekerja, akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana perusahaan-perusahaan kurir dapat menjalankan pola kemitraan ini tanpa melanggar hukum atau merugikan mitra mereka. Salah satu aspek penting yang perlu dianalisis adalah bagaimana kebijakan pemerintah mengenai *gig economy*, yang mencakup pekerja lepas atau kontrak jangka pendek, mempengaruhi hubungan kerja antara perusahaan kurir dan mitra mereka.

Di banyak negara, termasuk Indonesia, *gig economy* berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin mengandalkan platform digital untuk menjalankan aktivitas mereka. Namun, dengan perkembangan tersebut, muncul tantangan baru dalam hal pengaturan hukum terkait dengan hak-hak mitra, seperti hak atas upah yang adil, asuransi, dan tunjangan lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini juga berfokus pada analisis kebijakan pemerintah untuk memahami bagaimana regulasi yang ada dapat mendukung atau menghambat implementasi strategi kemitraan operasional di industri kurir.

Analisis kebijakan tidak hanya dilihat dari perspektif ketenagakerjaan, tetapi juga dari sisi pengaturan yang lebih luas, seperti kebijakan transportasi, logistik, dan pajak. Regulasi dalam sektor-sektor ini dapat mempengaruhi bagaimana perusahaan-perusahaan kurir beroperasi, terutama dalam hal kemudahan akses terhadap infrastruktur dan biaya operasional yang terkait dengan pengiriman barang. Dalam konteks ini, penelitian ini akan menganalisis dampak kebijakan pemerintah terhadap keberlanjutan dan efektivitas pola kemitraan operasional, baik bagi perusahaan kurir maupun mitra mereka. Setelah mengumpulkan data melalui studi literatur dan analisis kebijakan, langkah berikutnya dalam penelitian ini adalah melakukan analisis perbandingan. Analisis perbandingan ini bertujuan untuk membandingkan keuntungan dan tantangan yang muncul dari penerapan strategi kemitraan operasional dalam industri kurir, baik dari sudut pandang perusahaan maupun mitra. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan model kemitraan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keuntungan yang diperoleh perusahaan dari pola kemitraan operasional dalam industri kurir sangatlah signifikan, terutama dalam hal efisiensi biaya, fleksibilitas operasional, dan kemampuan untuk memperluas jangkauan pasar tanpa harus melakukan investasi besar. Salah satu keuntungan utama yang dihadapi perusahaan adalah efisiensi biaya yang dapat dicapai melalui penggunaan mitra. Dalam pola kemitraan ini, perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya tetap yang besar, seperti gaji bulanan dan tunjangan yang biasanya diberikan kepada karyawan tetap. Sebaliknya, mitra yang berstatus sebagai pekerja lepas atau independen hanya dibayar berdasarkan jumlah pengiriman yang mereka lakukan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pengeluaran tetap, serta menyesuaikan jumlah mitra dengan kebutuhan bisnis yang fluktuatif. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya dapat menghemat biaya, tetapi juga dapat mengalokasikan dana untuk aspek lain yang lebih strategis, seperti peningkatan teknologi atau pengembangan pasar. Selain efisiensi biaya, fleksibilitas operasional juga menjadi keuntungan yang sangat penting bagi perusahaan. Dalam industri kurir, permintaan terhadap layanan pengiriman sering kali sangat bergantung pada waktu-waktu tertentu, seperti musim belanja online atau periode promosi. Dalam kondisi tersebut, perusahaan harus mampu menyesuaikan jumlah mitra secara cepat untuk memenuhi lonjakan permintaan. Pola kemitraan operasional memungkinkan perusahaan untuk melakukan penyesuaian jumlah mitra dengan lebih mudah tanpa adanya ikatan kontrak jangka panjang yang mengharuskan perusahaan untuk tetap membayar gaji tetap kepada karyawan meskipun volume pengiriman menurun.

Hal ini memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk meningkatkan atau mengurangi jumlah mitra sesuai dengan kebutuhan pasar, yang tentunya membantu perusahaan tetap efisien dan responsif terhadap perubahan kondisi pasar. Keuntungan lainnya adalah kemampuan perusahaan untuk melakukan ekspansi ke wilayah baru dengan cepat. Mengembangkan layanan ke wilayah yang lebih luas sering kali memerlukan investasi besar, seperti penyediaan infrastruktur dan perekrutan karyawan baru. Dengan menggunakan mitra sebagai bagian dari strategi kemitraan operasional, perusahaan dapat memperluas jangkauan layanan mereka ke berbagai daerah tanpa harus berinvestasi dalam pembangunan kantor cabang atau fasilitas lainnya. Perusahaan cukup mencari mitra lokal yang sudah mengenal wilayah tersebut dan memiliki akses ke jaringan distribusi yang sudah ada. Dengan demikian, perusahaan dapat memperluas jangkauannya secara cepat dan efisien, tanpa perlu melakukan investasi besar yang dapat membebani keuangan perusahaan. Namun, meskipun pola kemitraan operasional memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan, pola ini juga menghadirkan sejumlah tantangan bagi mitra yang terlibat. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh mitra adalah ketidakstabilan penghasilan. Berbeda dengan karyawan tetap yang mendapatkan gaji bulanan, mitra dalam kemitraan operasional sering kali hanya memperoleh penghasilan berdasarkan jumlah order yang mereka terima. Penghasilan mitra bisa sangat fluktuatif tergantung pada jumlah pengiriman yang mereka lakukan, yang berarti ada periode-periode tertentu di mana mitra bisa mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi, tetapi ada pula periode yang penghasilannya sangat rendah.

Ketidakpastian pendapatan ini bisa menambah kesulitan hidup bagi mitra, terutama jika mereka mengandalkan pendapatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Selain

ketidakstabilan penghasilan, tantangan lain yang dihadapi oleh mitra adalah minimnya jaminan sosial. Sebagian besar mitra dalam pola kemitraan operasional tidak mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan yang diberikan kepada karyawan tetap, seperti asuransi kesehatan, tunjangan pensiun, atau hak cuti. Hal ini berarti mitra harus menanggung sendiri biaya kesehatan dan kebutuhan pensiun di masa depan tanpa adanya dukungan dari perusahaan. Keadaan ini semakin memperburuk ketidakpastian yang mereka hadapi, karena selain ketidakpastian penghasilan, mereka juga tidak memiliki jaminan keamanan sosial yang dapat melindungi mereka dari risiko kesehatan atau usia lanjut. Minimnya perlindungan ini juga dapat berdampak pada kesejahteraan mental dan emosional mitra, karena mereka tidak merasa ada rasa aman dalam pekerjaan mereka. Tantangan lainnya adalah ketergantungan mitra pada platform yang disediakan oleh perusahaan. Dalam pola kemitraan operasional, mitra biasanya bergantung pada sistem atau platform yang dibuat oleh perusahaan untuk menerima dan menyelesaikan pesanan pengiriman.

Mitra tidak memiliki kendali penuh terhadap kebijakan tarif, alokasi pekerjaan, atau sistem kerja yang ditetapkan oleh perusahaan. Keputusan-keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan perusahaan yang mungkin membuat perubahan kebijakan yang tidak selalu menguntungkan bagi mitra. Misalnya, perubahan tarif yang mendadak atau pembatasan jumlah pekerjaan yang tersedia bisa langsung mempengaruhi penghasilan mitra. Ketergantungan ini sering kali membuat mitra merasa tidak memiliki kontrol atas pekerjaan mereka dan sangat bergantung pada keputusan yang diambil oleh perusahaan. Di sisi lain, pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan kesejahteraan mitra melalui regulasi yang jelas dan adil. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat mendukung keberlangsungan bisnis perusahaan kurir, namun pada saat yang sama juga melindungi hak-hak mitra yang berperan penting dalam operasi perusahaan tersebut. Salah satu regulasi penting yang memengaruhi pola kemitraan operasional adalah regulasi ketenagakerjaan. Pemerintah perlu menetapkan batasan yang jelas antara pekerja tetap dan mitra independen untuk menghindari potensi eksploitasi. Perusahaan perlu memastikan bahwa mereka tidak mempekerjakan mitra sebagai pengganti karyawan tetap tanpa memberikan hak-hak yang semestinya, seperti jaminan sosial dan perlindungan ketenagakerjaan. Selain itu, aturan pajak juga mempengaruhi pola kemitraan operasional.

Bagi mitra yang bekerja sebagai pekerja lepas, kewajiban pajak penghasilan perlu disederhanakan agar tidak membebani mereka secara finansial. Pajak yang terlalu rumit atau tinggi bisa menjadi kendala bagi mitra, terutama bagi mereka yang hanya memperoleh penghasilan tidak tetap. Oleh karena itu, kebijakan pajak yang lebih mudah dipahami dan lebih ringan bagi mitra sangat diperlukan untuk mendukung keberlanjutan kemitraan operasional. Pemerintah juga harus menetapkan standar perlindungan konsumen untuk menjaga kualitas layanan dalam industri kurir. Regulasi ini penting untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan layanan yang aman dan berkualitas, sementara perusahaan kurir tetap dapat menjaga efisiensi dan fleksibilitas dalam operasional mereka. Standar layanan yang jelas akan memberikan arah bagi perusahaan untuk mempertahankan kualitas pengiriman, serta memastikan bahwa mitra dapat memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Secara keseluruhan, meskipun strategi kemitraan operasional terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sistem ini masih menghadirkan tantangan signifikan bagi mitra, terutama terkait dengan ketidakpastian ekonomi dan minimnya perlindungan sosial. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang lebih jelas dan lebih adil untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih berkelanjutan dan seimbang, di mana baik perusahaan maupun mitra dapat merasakan keuntungan dan perlindungan yang adil. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kebijakan yang tidak hanya mendukung pertumbuhan industri, tetapi juga melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam industri tersebut.

SIMPULAN

Strategi kemitraan operasional dalam industri kurir memberikan keuntungan bagi perusahaan melalui efisiensi biaya dan fleksibilitas bisnis. Namun, dari perspektif mitra, terdapat tantangan seperti ketidakstabilan penghasilan serta minimnya jaminan sosial. Peran pemerintah menjadi krusial dalam mengatur skema ini agar menciptakan keseimbangan kepentingan. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah:

- Peningkatan Regulasi: Pemerintah perlu merancang kebijakan ketenagakerjaan yang melindungi hak mitra tanpa menghambat fleksibilitas bisnis.
- Transparansi Tarif dan Insentif: Perusahaan perlu memberikan informasi yang jelas mengenai sistem pembayaran serta insentif bagi mitra.
- Skema Asuransi untuk Mitra: Diperlukan mekanisme asuransi mandiri yang dapat diakses oleh mitra guna meningkatkan perlindungan sosial.

- Pelatihan dan Pengembangan: Perusahaan sebaiknya menyediakan pelatihan bagi mitra guna meningkatkan kompetensi dan daya saing mereka.
- Evaluasi Berkelanjutan: Model kemitraan harus dievaluasi secara berkala guna memastikan kesejahteraan mitra tetap terjaga tanpa mengurangi efisiensi bisnis.

REFERENSI

- Aji, A. T. S., Sari, R. P., & Dede, D. (2021). Analisis Optimalisasi Penempatan Wilayah Dan Efisiensi Jarak Perjalanan Kurir Ke Berbagai Tujuan Dengan Metode Assignment Dan Networking. *Barometer*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.35261/Barometer.V6i2.4618>
- Anugrah, R. G., Djodjobo, C. V., & Rizza, F. (2022). Pola Kerja Kemitraan Di Era Ekonomi Berbagi (Studi Kasus Logistik E-Commerce Di Pt.X). *Cemerlang : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 2(4), 230–243. <https://doi.org/10.55606/Cemerlang.V2i4.540>
- Fadillah, F. (2024). Kedudukan Dan Tanggung Jawab Kurir Dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Cash On Delivery (Cod) (Studi Kota Palu). *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro*, 1(2), Article 2.
- Fauzi, I. R. (2024). Analisis Risiko Operasional Pada Proses Pengiriman Barang Melalui Penerapan Enterprise Risk Management (Erm) (Studi Kasus: Kantor Pos Cianjur). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), Article 4. <https://doi.org/10.31004/Innovative.V4i4.13722>
- Isnardono, & Nicholas, A. (2024). Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Kurir Di Pt Satria Antara Prima Tbk Cabang Jakarta Timur. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 1(1), Article 1.
- Izzati, N. R. (2022). Ketidakseimbangan Kewajiban Para Pihak Dalam Regulasi Ojek Online: Distorsi Logika Hubungan Kemitraan Ekonomi Gig. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.22437/Ujh.5.2.325-356>
- Kahfi, A. N. M. B. A., & Wahjuningati, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Gojek Atau Kurir Pada Pengiriman Paket Secara Cash On Delivery Atau Bayar Ditempat. *Dekrit (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*, 12(1), Article 1.
- Nariendra, P. W., Saputri, A. W. P., & Lumbangaol, C. L. (2021). Analisis Rute Delivery (Antaran) Pada Perusahaan Jasa Kurir Di Kota Bandung. *Jurnal Manajemen Logistik Dan Transportasi*, 7(1), 63–75.
- Simbolon, Y. (2022). Analisis Hubungan Kemitraan Antara Kurir Dan Perusahaan Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Doktrin Undue Influence. *Sapientia Et Virtus*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.37477/Sev.V7i2.373>
- Syahadat, R. A. A. (2019). Optimalisasi Strategi Operasi Yang Efektif Dan Efisien Pada Bisnis Pastry. *Jitmi (Jurnal Ilmiah Teknik Dan Manajemen Industri)*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.32493/Jitmi.V2i1.Y2019.P45-51>
- Wijonarko, G. (2023). Pengaruh Disiplin Kerja Dan Terhadap Kinerja Kurir Pada Perusahaan Jasa Pengiriman Anteraja Di Kota Surabaya. *Eksekutif: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 20(1 Juni), Article 1 Juni. <https://doi.org/10.60031/1bwq0796>
- Wirabuana, R. F., & Prasetya, B. P. (2024). Strategi Jitu Pt. Unilever Indonesia Mengoptimalkan Operasional Di Tengah Dinamika Global. *Journal Of Exploratory Dynamic Problems*, 1(3), Article 3.